



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN**

**KEPUTUSAN  
PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 989 /PAN/INT/OT.01.1/4/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021  
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan zona integritas pada Mahkamah Agung perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya sistematis;
  - b. Bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok kerja pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di Mahkamah Agung;
  - c. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

## **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : **PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021;**

**PERTAMA**

: Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kepaniteraan Mahkamah Agung RI adalah :

1. Merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas di Kepaniteraan;
2. Membentuk Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas Kepaniteraan Dengan Susunan Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;
3. Membuat pedoman, petunjuk dan langkah-langkah yang bersifat

mendasar, komprehensif dan sistematis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas ;

- Melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

- Melakukan revisi atas peraturan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona di lingkungan eselon 1 (satu) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 April 2021

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI**



**Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H. M.H.**  
**NIP. 19591111 198601 1 002**



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
- Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- Yang Bersangkutan.

**TIM REFORMASI BIROKRASI KEPANITERAAN  
 UNTUK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NO	Kedudukan dalam Tim RB	Nama	Jabatan
1		<b>TIM SEKRETARIAT</b>	
	Pembina	Dr. Ridwan Mansyur, S.H. M.H	Panitera
	Ketua	Dr. H. Haswandi, SH. SE. M.Hum	Panmud Perdata Khusus
	Wakil	H. Joni Effendi, SH., MH.	Sekretaris Kepaniteraan
	Sekretaris	Drs. Parto Hutomo, SH., MM	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian
2		<b>KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)</b>	
	Ketua	DR. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.	Panmud Pidana Umum
	Wakil	Dr. Mardi Candra, S.Ag. M.Ag. MH.	Panitera Muda Kamar Agama
	Sekretaris	Hari Saputra, S.Kom.,MM	Kasubag Perencanaan
	Anggota	Lely Sri Suryati, S.H., M.M	Analisis Perkara Peradilan
		Mukhlis Aryanto, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi
		Dewi Ratna Puri, S.H.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
		Eka Aryati Sumardiyono, SH	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3		<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II)</b>	
	Ketua	H. Andi Cakra Alam, SH. MH	Panmud Perdata
	Wakil	Mutia Widyawati, SE., MM	Kabag Keuangan
	Sekretaris	Sufrizal Agustian, S.Kom., MH.	Kasubag Perlengkapan
	Anggota	Amellia S, SH. MH.	Koordinator PK pada Panmud Perdata Agama
		S.T. Riyadi Kris Nugroho, SH.	Koordinator Kasasi Panmud Pidana Militer
		Taufik Faturrohman, A.Md.	Analisis Perkara Peradilan
		Teuku Syamsul Ramadan, S.Kom., MMSI.	Analisis Data dan Informasi
		Rachmawati, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Husnul Khotimah, SHI	Perencanaan Anggaran
4		<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN MANAJEMEN SDM (AREA III)</b>	
	Ketua	Drs. H. Abd. Ghoni, SH. MH.	Panmud Perdata Agama
	Wakil	Rut Endang Lestari, SH.	Panitera Muda Kamar TUN
	Sekretaris	Purwanti, SH.MM	Kasubag Kepegawaian
	Anggota	Rantono, SH. MH.	Koordinator Arbitrase, BPSK, KPPU pada Panmud Perdata Khusus
		Daru Sampurno, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan
		Muhammad Fahmi Amiruddin, S.Kom	Analisis Data dan Informasi
		Ria Tresina, S.Kom	Analisis Sumber Daya Manusia

		Selly Rachmawati, S.H., M.H.		Aparatur
		Diki Agung Prannoto, S.H.		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
5	<b>KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (AREA IV)</b>			Analisis Perkara Peradilan
	Ketua	H. Suharto, SH. M.Hum		Panmud Pidana Khusus
	Wakil	Miharti Verliani,SH., MH		Kabag Umum
	Sekretaris	Gina Uminingsih, SH.		Kasubbag Anggaran dan Perbendaharaan
	Anggota	Maryati, SH.		Koordinator Grasi dan PK pada Panmud Pidana
		Arif Donovan, SH.		Koordinator HUM pada Panmud TUN
		Novita Dian Mayasari, S.H.		Analisis Perkara Peradilan
		Firdian Ariestyono, S.Kom.		Analisis Data dan Informasi
		Muhammad Frashetya. SH.		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
		Okky Dirgantara, SH		Analisis Perkara Peradilan
6	<b>KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V)</b>			
	Ketua	Kolonel Apel Ginting, SH. MH		Panmud Pidana Militer
	Wakil	Frieske Purnama Pohan, SH.		Panitera Muda Kamar Perdata
	Sekretaris	Nevita Sari, S.Kom., MH		Kasubbag Tata Usaha
	Anggota	Eko Nugroho, SH. MH.		Koordinator Kasasi pada Panmud Pidana Khusus
		Samsul Hidayat, SH.		Koordinator Tata Usaha pada Panmud TUN
		Wardhani,SH.,MH		Koordinator Komputer Kepaniteraan
		Klen Putri Wara, S.T.		Analisis Data dan Informasi
		Okta Hadi Nugroho, SH.		Analisis Perkara Peradilan
		Arif Ainul Rofiq, S.H		Analisis Perkara Peradilan
		Margi Purwandani, ST		Analisis Data dan Informasi
7	<b>KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN(AREA VI)</b>			
	Ketua	Ashadi, SH.		Panitera Muda TUN
	Wakil	Murganda Sitompul, SH. MH.		Panitera Muda Kamar Pidana
	Sekretaris	Asep Nursobah, S.Ag. MH.		Hakim Yustisial
	Anggota	Muhammad Pahlevi, SH. MH.		Koordinator PK pada Panmud Perdata
		Dito Hari Prastio, S.H.,M.M		Analisis Perkara Peradilan
		Musta'in,S.Kom., MH.		Analisis Data dan Informasi
		Arif Fadhilah,S.Kom., MM.		Analisis Data dan Informasi
		Moch. Nurhuda Febriansyah,SH.		Analisis Perkara Peradilan

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI**



**Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H. M.H.**  
**NIP. 19591111 198601 1 002**